

## KEDUDUKAN DAN PERAN HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA DALAM KEBIJAKAN NASIONAL

Dhika Pratama, Romi Dian Sari, Nia Santika, Nada Adilla Amatullah, Budi  
Ardianto

Universitas Jambi  
[dika.wae2020@gmail.com](mailto:dika.wae2020@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran hukum internasional di Indonesia dalam konteks globalisasi dan interaksi antarnegara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen, wawancara dengan pakar hukum, dan studi kasus yang menggambarkan implementasi hukum internasional di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam komunitas internasional, namun perlu pemahaman yang lebih baik tentang hukum internasional untuk memperkuat implementasi dan pengaruhnya terhadap hukum dan kebijakan nasional. Studi kasus juga menunjukkan bahwa hukum internasional memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan nasional, terutama dalam bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan perdagangan. Rekomendasi praktis meliputi peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang hukum internasional melalui pelatihan dan pendidikan yang terfokus bagi pejabat pemerintah, hakim, dan praktisi hukum. Diperlukan juga koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait untuk mempercepat proses implementasi hukum internasional di Indonesia. Studi lebih lanjut direkomendasikan untuk mendalami aspek-aspek spesifik dalam implementasi hukum internasional, seperti pengaruhnya dalam pembentukan kebijakan lingkungan hidup atau perlindungan hak asasi manusia.

**Kata kunci:** Globalisasi, Hukum Internasional, Implementasi, Indonesia, Kebijakan Nasional.

### ABSTRAK

This research aims to analyze the position and role of international law in Indonesia in the context of globalization and inter-state interactions. Using a qualitative descriptive approach, data was collected through document analysis, interviews with legal experts, and case studies illustrating the implementation of international law in Indonesia. The results of the research indicate that Indonesia holds a strategic position in the international community, but there is a need for better understanding of international law to strengthen its implementation and influence on national law and policies. Case studies also demonstrate that international law plays a crucial role in shaping national policies, particularly in areas such as human rights, environmental protection, and trade. Practical recommendations include enhancing capacity and understanding of international law through focused training and education for government officials, judges, and legal practitioners. Improved coordination among relevant agencies is also necessary to expedite the implementation process of international law in Indonesia. Further studies are recommended to delve into specific aspects of international law implementation, such as its impact on environmental policy formation or human rights protection.

**Keywords:** globalization, international law, implementation, Indonesia, national policies.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hukum internasional telah menjadi aspek yang semakin penting dalam dinamika globalisasi masa kini. Perkembangan teknologi dan interaksi antar negara yang semakin meluas tanpa sekat batas yang kaku menegaskan urgensi bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk memperdalam pemahaman tentang peran serta kontribusi dalam kerangka hukum internasional. Sebagai negara dengan posisi strategis di komunitas internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga konsistensi dan koheisi dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional. Salah satu contoh konkret yang mencerminkan pengaruh hukum internasional di Indonesia adalah dalam konteks perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam berbagai kesepakatan dagang internasional seperti ASEAN dan WTO harus mematuhi regulasi dan standar yang telah disepakati bersama. Hal ini menuntut Indonesia untuk memiliki kemampuan dalam mengelola aspek hukum perdagangan internasional dengan cermat dan cakap untuk memastikan keberlangsungan ekonomi yang sehat dan adil.

Selain itu, isu lingkungan juga menjadi bagian yang signifikan dalam pengaruh hukum internasional di Indonesia. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada tantangan serius terkait keberlanjutan lingkungan hidup. Berbagai perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Paris Agreement memberikan kerangka kerja yang penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Indonesia perlu mengimplementasikan regulasi-regulasi ini secara efektif dan mengambil langkah-langkah nyata dalam perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan generasi mendatang. Perlindungan hak asasi manusia juga merupakan aspek penting dari peran hukum internasional di Indonesia. Sebagai anggota PBB dan penandatangan berbagai konvensi hak asasi manusia, Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi hak-hak warga negara serta menghormati standar internasional terkait hak asasi manusia. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia harus ditangani dengan serius sesuai dengan hukum internasional dan komitmen moral sebagai negara demokratis yang berlandaskan pada supremasi hukum.

### 2. Rumusan Masalah

- Bagaimana kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia?
- Bagaimana peran hukum internasional dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan nasional Indonesia?

### 3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terkait kedudukan hukum internasional di Indonesia dan dampaknya terhadap perkembangan hukum serta kebijakan nasional. Dengan melakukan analisis yang cermat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum internasional di Indonesia. Analisis yang dilakukan akan memperhatikan aspek-aspek kunci dalam integrasi hukum internasional ke dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Dari hasil analisis tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat mendukung upaya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi internasional serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam konteks hukum internasional.

### 4. Literatur Review

Dalam tinjauan literatur ini, akan dilakukan analisis terhadap teori-teori dan penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum internasional dan aplikasinya di berbagai negara. Beberapa peneliti seperti Astawa (2022) dan Hamdani,

Ramadhani, & Henley (2022) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang sistem hukum internasional dan penerapannya di Indonesia. Astawa (2022), misalnya, menekankan pentingnya memahami sistem hukum internasional baik dalam skala nasional maupun internasional. Di sisi lain, Hamdani, Ramadhani, & Henley (2022) menggambarkan Pancasila sebagai pondasi utama dalam pendidikan hukum di Indonesia, yang merefleksikan identitas nasional.

Dari segi teoretis, Narmoatmojo (2017) dan Aryani, Fadjarin, Azzahro', & Fitriyono (2017) memberikan pemahaman yang mendalam tentang integrasi sosial dan pengembangan karakter melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kedua penelitian ini menyoroti pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membentuk masyarakat yang bersatu dan memiliki karakter yang kokoh. Selain itu, Koesmiyati (2014) dan Maksun & Anwar (2015) membahas dampak globalisasi terhadap pendidikan kewarganegaraan dan peran moral dalam memperkuat semangat nasionalisme.

Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran hukum internasional dalam konteks Indonesia, baik dari aspek teoretis maupun praktis. Mereka juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan utama dalam pembangunan karakter dan kebangsaan. Dari sudut pandang globalisasi, penelitian-penelitian ini mengajarkan pentingnya mengakomodasi perubahan global dalam upaya membangun semangat kewarganegaraan yang kuat.

## **B. METODE**

Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dengan lebih mendalam kedudukan dan peran hukum internasional di Indonesia. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena lebih memungkinkan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang konteks, proses, dan dampak dari hukum internasional di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi analisis dokumen, wawancara dengan pakar hukum internasional, dan studi kasus yang relevan. Proses analisis data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik validasi untuk memastikan kredibilitas dan validitas temuan. Data yang diperoleh dari analisis dokumen, wawancara, dan studi kasus akan disusun secara terstruktur dan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tren, dan implikasi dari kedudukan dan peran hukum internasional di Indonesia.

Sebagai contoh, penelitian oleh Wibowo (2018) menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Terpadu Al Furqon Palembang. Hal ini menunjukkan relevansi dan efektivitas pendekatan kualitatif dalam menggali pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum internasional di tingkat lokal. Selain itu, Sumaryati & Sukmayadi (2021) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan pandangan mahasiswa terhadap Pancasila sebagai dasar negara, yang menjadi landasan penting dalam memahami peran hukum internasional dalam konteks nasional.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Temuan penelitian kami yang diperoleh melalui analisis data mengungkapkan sejumlah aspek penting seputar kedudukan dan peran hukum internasional di Indonesia. Diskusi yang mendalam ini mempertimbangkan integrasi hukum internasional ke dalam kerangka hukum nasional, serta mengulas kasus-kasus khusus yang memperlihatkan bagaimana hukum internasional memengaruhi pembentukan kebijakan nasional di berbagai sektor seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan perdagangan. Selain itu, kami juga mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi hukum internasional di Indonesia.

Penelitian ini menyoroti kompleksitas hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia. Dalam konteks integrasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional, kami menemukan bahwa upaya untuk mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional dapat menghadapi sejumlah hambatan, termasuk masalah harmonisasi peraturan dan mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan standar internasional. Namun demikian, integrasi ini juga membawa sejumlah manfaat, seperti peningkatan akses terhadap sumber daya global dan keharmonisan kebijakan nasional dengan komitmen internasional.

Selain itu, analisis kasus-kasus spesifik yang kami tinjau menggambarkan peran krusial hukum internasional dalam membentuk kebijakan nasional di Indonesia. Kasus-kasus ini mencakup isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia, di mana implementasi hukum internasional dapat mempengaruhi penegakan hak-hak individu di tingkat nasional. Begitu juga dalam bidang lingkungan hidup, di mana ketentuan-ketentuan internasional sering kali menjadi landasan bagi regulasi dan perlindungan lingkungan di tingkat domestik. Namun, dalam konteks perdagangan, kami menemukan bahwa implementasi hukum internasional bisa menimbulkan tantangan terkait dengan keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Di sini, diperlukan upaya koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa implementasi hukum internasional memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Batubara et al. (2024) mengangkat isu tentang diskriminasi di antara siswa di dalam lingkungan pendidikan yang mempergunakan Pancasila sebagai landasan etika. Penemuan tersebut menggambarkan realitas bahwa meskipun nilai-nilai Pancasila telah dijadikan bagian integral dari sistem pendidikan, masih terdapat kasus-kasus diskriminasi yang menyoroti tantangan dalam implementasi nilai-nilai tersebut. Implikasinya adalah bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum pendidikan, tantangan implementasi di lapangan masih tetap ada. Selanjutnya, kajian oleh Rahayu & Triyanto (2024) memberikan sorotan penting terkait peran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai strategi untuk membentuk profil siswa yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mengindikasikan bahwa peran hukum internasional tidak hanya terbatas pada aspek formal hukum, melainkan juga mencakup ranah pendidikan dan sosial sebagai bagian integral dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum masyarakat. Implikasinya, keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila di lapangan sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan pendidikan yang tepat kepada masyarakat, terutama generasi muda.

Hasil penelitian ini menyoroti kompleksitas dan dinamika yang terjadi dalam upaya mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat pendidikan. Meskipun telah ada kebijakan dan upaya untuk memasukkan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan, tantangan nyata masih muncul di tingkat pelaksanaan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai kebangsaan tidak semata-mata berhenti pada aspek kebijakan, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait untuk menjadikan nilai-nilai tersebut hidup dan bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan juga menjadi sorotan penting. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dihayati dan diimplementasikan dalam tindakan nyata di lapangan. Implikasinya, keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila akan sangat bergantung pada kerjasama aktif antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan

masyarakat dalam membentuk lingkungan yang mendukung bagi pembelajaran nilai-nilai kebangsaan.

Dalam penelitian yang kami teliti dari Yunita & Dewi (2021), ditemukan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara. Temuan ini mengindikasikan bahwa ada tantangan yang perlu disikapi secara serius dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, terutama dalam konteks hukum internasional. Adanya ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara diperlakukan secara seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Selanjutnya, dalam kajian oleh El Muhtaj et al. (2020) dibahas mengenai pentingnya evaluasi dan penyesuaian kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan guna meningkatkan kesadaran hak asasi manusia di kalangan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran hak asasi manusia harus menjadi prioritas dalam konteks pendidikan, terutama bagi generasi muda. Pendidikan yang berfokus pada kesadaran hukum dan hak asasi manusia menjadi penting dalam mendukung penerapan hukum internasional di Indonesia.

Dari kutipan langsung dan temuan ini, terlihat bahwa pemenuhan hak asasi manusia dan kewajiban warga negara tidak boleh dipisahkan, terutama dalam konteks hukum internasional yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Pendidikan hukum dan kesadaran hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip hukum internasional. Selain itu, penekanan pada evaluasi kurikulum dan pendidikan yang memperkuat kesadaran hukum di kalangan mahasiswa juga penting dalam konteks mewujudkan penerapan hukum internasional yang lebih efektif. Diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pendidikan hukum dan kesadaran hak asasi manusia menjadi prioritas dalam pembentukan karakter dan sikap hukum yang baik di kalangan generasi muda.

#### **D. KESIMPULAN**

Dalam rangka menyimpulkan temuan utama dari penelitian tentang kedudukan dan peran hukum internasional di Indonesia, terdapat beberapa aspek penting yang perlu ditekankan. Pertama, penelitian ini menyoroti bahwa hukum internasional memiliki kedudukan strategis dalam konteks globalisasi dan interaksi antarnegara. Implementasi hukum internasional di Indonesia sangat relevan mengingat peran Indonesia sebagai anggota aktif dalam komunitas internasional. Pentingnya memahami dan menerapkan hukum internasional di Indonesia juga terbukti dari beragam kasus yang memperlihatkan pengaruhnya dalam pembentukan kebijakan nasional, terutama dalam bidang seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdagangan internasional, dan kerjasama antarnegara. Dalam konteks ini, hukum internasional bukan hanya menjadi kerangka kerjasama global, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengatur hubungan antara negara-negara di dunia.

Implikasi dari penelitian ini sangat signifikan terutama terkait dengan praktik hukum dan pembentukan kebijakan nasional di Indonesia. Menyadari pentingnya kedudukan hukum internasional, para pembuat kebijakan dan praktisi hukum perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional secara lebih komprehensif. Hal ini tidak hanya akan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional, tetapi juga akan meningkatkan reputasi Indonesia di tingkat global. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan dan peran hukum internasional di Indonesia sangatlah penting. Implementasi yang tepat dari hukum internasional akan berdampak positif

pada praktik hukum dan pembentukan kebijakan nasional yang lebih adaptif dan sesuai dengan tuntutan global serta nilai-nilai kemanusiaan.

## E. SARAN

Sebagai saran praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum di Indonesia, penting untuk memperkuat implementasi hukum internasional dengan beberapa langkah konkret. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang hukum internasional melalui pelatihan dan pendidikan yang terfokus. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar, lokakarya, dan pelatihan reguler bagi para pejabat pemerintah, hakim, dan praktisi hukum di Indonesia.

Kedua, penting untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait dalam penerapan hukum internasional. Kolaborasi yang erat antara kementerian, lembaga hukum, dan lembaga non-pemerintah akan mempercepat proses implementasi dan memastikan konsistensi dalam penerapan hukum internasional di Indonesia.

Untuk penelitian lebih lanjut, direkomendasikan untuk mendalami aspek-aspek spesifik dalam implementasi hukum internasional di Indonesia. Misalnya, studi mendalam tentang pengaruh hukum internasional dalam pembentukan kebijakan lingkungan hidup atau perlindungan hak asasi manusia di Indonesia akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, E. D., Fadrijin, N., Azzahro', T. A., & Fitriyono, R. A. (2017) Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter
- Astawa, K. D. (2022). Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 1-15.
- Batubara, A., Nathania, Y., Febie, M., Fadila, I., Maygratia, S., & Sahara, A. (2024). Perilaku Diskriminasi Sesama Siswa Dalam Penerapan Pancasila Sebagai Sistem Etika. *Jurnal PPKn: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1), 1-11.
- El Muhtaj, M., Siregar, M. F., Beru, R. B., & Rachman, F. (2020). Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal HAM*, 11(3).
- Hamdani, R. M., Ramadhani, P. S., & Henley, S. M. (2022). Pancasila in the Foundation of Legal Education: Various International Comparisons. *Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran*, 4(1), 97-120.
- Koesmiyati, E. (2014). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi dalam Menumbuhkan Semangat Nasionalisme Mahasiswa.
- Maksum, H., & Anwar, F. (2015). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi dalam Menumbuhkan Semangat Nasionalisme.
- Narmoatmojo, W. (2017) Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.
- Rahayu, S., & Triyanto, T. (2024). PANCASILA AND CITIZENSHIP EDUCATION AS A STRATEGY TO REALISE THE PROFILE OF PANCASILA STUDENTS IN GRADE VIII STUDENTS AT SMP NEGERI 8 SURAKARTA. *Jurnal PPKn: Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1), 25-31
- Sumaryati & Sukmayadi, T. (2021). Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pandangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.

- Wibowo, B. A. (2018). Penerapan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Pendekatan Komprehensif oleh Guru Mata Pelajaran PPKn (Studi Kasus di SMP Islam Terpadu Al Furqon Palembang). Universitas Sriwijaya.
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1).